

## **BAB V PENUTUP**

### **A Kesimpulan**

Berdasarkan segala rangkaian hasil analisis penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara yang dihubungkan dengan pendekatan perundang-undangan, konsep atau teori dapat penulis simpulkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Perlindungan hukum pemegang hak cipta atas konten karya siaran terhadap tindakan komersialisasi pihak penyelenggara tanpa izin dapat dilakukan dengan cara yaitu secara hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata. Hukum administrasi yaitu dengan cara pendaftaran perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta dengan lembaga yang berwenang, pendaftaran merupakan tolak ukur perlindungan hukum yaitu Pasal 83 Ayat (1) UU NO. 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya. Melalui instrumen hukum pidana menurut pasal 113 ayat (3) UU NO. 28 Tahun 2014 dan gugatan perdata pada pelaku penyelenggara terhadap siaran piala dunia 2014 yang digunakan untuk kegiatan komersial berdasarkan pasal 99 ayat (1) UU NO. 28 Tahun 2014. Bentuk pelaksanaan pasal 9 ayat (2) UU NO. 28 Tahun 2014 terhadap pengumuman konten karya siaran secara komersil masih belum optimal dan menyimpan permasalahan hukum bagi pemegang hak cipta dalam hal ini PT NONBAR sebagai penerima kuasa Hak cipta dari PT ISM yang masih belum kuat secara SDM untuk menjalankan kewenangannya dalam melakukan pengawasan dan pemungutan royalti yang menjangkau seluruh Indonesia, sebaliknya pihak *restaurant* atau *cafe* tidak memahami adanya

pasal 9 ayat (2) UU NO. 28 Tahun 2014 tersebut sebab kurangnya pengetahuan dan masih banyak yang mempertanyakan unsur komersil seperti apa, informasi yang kurang dan juga landasan yang menjadi dasar perhitungan royalti dalam penggunaan konten karya siaran belum jelas dari mana.

2. Upaya hukum pemegang hak cipta dalam mengatasi sengketa pengumuman konten karya siaran secara komersil di *cafe* atau *restaurant* dapat dilakukan upaya preventif dan represif. Langkah preventif yaitu meningkatkan peran PT NONBAR dalam memberikan sosialisasi kepada pihak *restaurant* atau *cafe* dan mengoptimalkan koordinasi serta pengawasan dengan PT NONBAR yang ada di daerah dan membuat cabang dari pemegang hak cipta di kota-kota kecil, juga melakukan kerjasama dengan pemerintah. Sedangkan langkah represif yaitu Memberikan klarifikasi dan peringatan dalam bentuk somasi bagi pelanggar, dan mengupayakan jalur hukum menjadi ranah litigasi. Juga terdapat hambatan yang dialami oleh pemegang hak cipta proses sosialisasi tidak menyeluruh ke wilayah teritorial Indonesia juga kurangnya pengetahuan dari penyelenggara khususnya masyarakat awam apalagi yang dikatakan nonton bareng harus izin tidak hanya di *restaurant* atau *cafe* saja maupun tempat-tempat *outdoor* lainnya. Juga kurangnya sumber daya manusia yang ada dalam pemegang hak cipta dalam proses pemungutan dan memberikan sosialisasi secara menyeluruh di wilayah teritorial Indonesia, Kurangnya kesadaran penyelenggara untuk membayar royalti atau imbalan kepada pemegang hak cipta.

## **B    Saran**

Penulis dapat memberikan saran atau masukan kepada pihak-pihak terkait dalam perlindungan terhadap hak terkait pengumuman karya fonogram yang dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan yaitu:

1. Bagi PT NONBAR sebagai penerima kuasa hak cipta dari PT ISM agar segera menata organisasi internal dengan pembagian fokus kerja bidang mengingat luasnya objek penelitian mengenai hak cipta, selain itu membentuk dan mengoptimalkan cabang dari PT NONBAR di Daerah, dan menjalin hubungan koordinasi dengan dinas atau pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi undang-undang tersebut.
2. Bagi *Cafe* atau *Resturant* selaku penyelenggara agar ikut berperan aktif apabila ingin mengadakan menonton umum untuk kepentingan komersil, maksudnya mencari informasi terkait perizinan dan pembayaran royalti yang harus dibayar.